



## **ANALISIS PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI DESA DARA KUNCI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NTB**

Mey Susanti AS<sup>1</sup>, Kismartini<sup>2</sup>, Hartuti Purnaweni<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

### **Info Artikel**

#### *Sejarah Artikel:*

Diterima: 22 Februari 2018

Disetujui: 13 Maret 2018

Dipublikasikan: 30 Maret 2018

#### **Kata Kunci:**

Analisis, program, penyelenggaraan, hutan kemasyarakatan (HKm), kesejahteraan

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pelaksanaan program HKm oleh Kelompok HKm Wana Lestari di Desa Dara Kunci, Lombok Timur NTB; (2) menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan mengacu pada kesesuaian antara proses pelaksanaan Program HKm dengan PERDA Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambatnya mengacu pada teori Model Kesesuaian David C. Korten. Lokasi penelitian di Desa Dara Kunci karena beberapa pertimbangan yaitu Desa Dara Kunci merupakan salah satu dari tiga lokasi areal HKm di Pulau Lombok Provinsi NTB, akan tetapi wilayah di Desa Dara Kunci kerap dilanda bencana banjir bandang saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, studi pustaka dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan PERDA Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2004, karena (1) Motivasi masyarakat penerima manfaat untuk mengelola kawasan HKm; (2) Belum ada evaluasi program oleh pemerintah; (3) Bibit yang didatangkan tidak tepat musim; (4) Unit pelaksana teknis tidak didukung oleh sumber daya finansial yang memadai; (5) Luas areal kawasan HKm dan banyaknya kelompok mengakibatkan pendampingan kurang maksimal; (6) Program pemberdayaan terhadap masyarakat yang tidak tepat sasaran; (7) Pengembangan potensi masyarakat tidak optimal.

## **ANALYSIS OF COMMUNITY FOREST PROGRAM (HKm) IN DARA KUNCI VILLAGE EAST LOMBOK DISTRICT WEST NUSATGEGGARA PROVINCE**

#### **Keywords:**

Analysis, Program, Implementation, Community Forest (HKm), Welfare.

### **Abstract**

*This study aims to analyze (1) the implementation of Community Forest Program (HKm) by Wana Lestari Group in Dara Kunci Village, East Lombok NTB; (2) the supporting and inhibiting factors of program implementation. The research method is descriptive qualitative with reference to suitability between the implementation process of HKm Program with Regional Regulation of Province of NTB Number 6, 2004 concerning Guideline of Community Forest Implementation. To analyze the supporting and inhibiting factors refers to the theory of Conformity Model David C. Korten. The reason to choose Dara Kunci Village is because of several considerations that is Dara Kunci Village is one of three locations of HKm area in Lombok Island of West Nusa*

*Tenggara Province, but the area in Dara Desa Village is often hit by flood disaster during rainy season and drought during dry season. Data collection techniques with in-depth interviews, literature study and observation. The result of the research shows that there is inconsistency with Regional Regulation of Province of NTB Number 6, 2004, because (1) motivation of beneficiary community to manage HKm area; (2) There has been no program evaluation by the government; (3) Seeds that are imported are not seasonally appropriate; (4) The technical implementation unit is not supported by adequate financial resources; (5) Area of HKm area and number of groups resulted in less maximal assistance; (6) Community empowerment programs that are not properly targeted; (7) Development of community potential is not optimal.*

---

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:

fisip@undip.ac.id, meysusanti.as@gmail.com

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan dengan memanfaatkan potensinya tanpa merubah fungsi kawasan hutan. Dalam hal ini, upaya tersebut adalah melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat, di samping Hutan Desa dan Hutan Tanam Rakyat. Banyak pihak yang memandang kebijakan ini sebagai pengakuan Negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tidak hanya memiliki makna ekologis tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi.

Program HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. Program HKm yang merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat realitanya masih menyisakan permasalahan dan konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada Program Hutan Kemasyarakatan diantaranya adalah kebijakan yang tidak konsisten yang mengakibatkan kerusakan sumber daya hutan semakin hebat, tumpang tindihnya hak dan kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan, dan terhambatnya upaya pengembangan ekonomi masyarakat; Rendahnya pendapatan masyarakat yang diakibatkan oleh sumber daya hutan yang cenderung semakin rusak akibat eksploitasi hutan, menyebabkan masyarakat semakin sulit mengembangkan potensi diri. Akibatnya standar minimal kebutuhan masyarakat sulit terpenuhi, dan pada akhirnya masyarakat kurang dapat berpartisipasi dalam

program pembangunan; Kurangnya lapangan kerja yang tersedia menyebabkan masyarakat semakin tergantung pada sumber daya hutan sehingga mereka cenderung melegalkan segala cara dalam mengeksploitasi sumber daya hutan, yang mengakibatkan banyak pengangguran maupun setengah pengangguran sehingga produktivitas masyarakat rendah dan mudah dihasut untuk melakukan kegiatan yang negatif; Kurangnya peran dan sinergitas di antara para pihak (stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan/atau kesenjangan kegiatan sehingga tidak efektif dan efisien; Terjadinya gap antara kebijakan dan pelaksanaan (Retnowathi, 2015).

Realitas kegiatan pengelolaan hutan yang selama ini lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Akibatnya, timbul ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antar masyarakat, khususnya antar masyarakat yang memiliki akses terhadap manfaat hutan (pengusaha hutan, dan elit lokal) dengan masyarakat kebanyakan yang memiliki keterbatasan akses terhadap manfaat hutan.

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia (pendidikan, sosial ekonomi, dan informasi) mengakibatkan semakin terbatasnya akses masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terhadap manfaat ekonomi hutan. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tersebut, masyarakat terlebih dahulu harus diantarkan dari kemiskinan agar memperoleh akses terhadap pendidikan dan informasi.

Secara ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat melalui program hutan kemasyarakatan, memang memungkinkan masyarakat melestarikan sumber daya hutan, namun hal tersebut hanya mungkin dan akan berlangsung secara konsisten, bilamana pendapatan masyarakat sudah meningkat sampai di atas garis kemiskinan subsistence level atau dengan kata lain keseimbangan ekonomi masyarakat sudah berada di atas tingkat keseimbangan dasar (basic equilibrium). Tapi bila keseimbangan ekonominya masih di bawah keseimbangan dasar, maka masyarakat akan berusaha mencari sumber pencaharian lain meskipun dengan upah yang lebih rendah atau resiko yang tinggi termasuk mengeksploitasi sumber daya hutan. Dari sudut pandang lain, kerusakan sumber daya hutan juga dapat disebabkan oleh perilaku ekonomi masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Hal ini juga sangat tergantung pada pengetahuan, kesempatan, karakter individu, orientasi nilai, dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan semakin terbukanya akses mereka terhadap sumber daya hutan maka justru mempermudah mereka mengeksploitasi sumber daya hutan tersebut.

Atas dasar ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan yang baru yaitu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang selama ini terjadi, yaitu keamanan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Undang-Undang ini merupakan paradigma baru di bidang kehutanan karena di dalamnya banyak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengelola dan memelihara hutan sehingga diharapkan masyarakat nantinya akan lebih terberdaya, khususnya dalam pengelolaan hutan.

Kebijakan pembangunan kehutanan telah mengalami perkembangan sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang semula pemerintahan lebih

bersifat sentralistik menjadi lebih bersifat desentralistik. Adanya desentralisasi di bidang kehutanan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan, dan diharapkan hutan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya.

Secara nasional, pelaksanaan konsep HKm telah dikembangkan pada 22 Provinsi dengan luas keseluruhan sekitar 448.217 Ha yang terdiri dari areal Usulan Penetapan Wilayah HKm (162.112,91 Ha), areal Pembangunan HKm (208.327 Ha), areal Kerja Social Forestry (55.420 Ha) dan areal yang diberi ijin sementara (62.357 Ha). Total kelompok masyarakat yang terlibat pada kegiatan HKm adalah 519 kelompok (Media DAS, 2007).

Salah satu provinsi yang telah melaksanakan HKm adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa praktek HKm yang ada di NTB antara lain HKm yang dikelola oleh Perum Perhutani sebagai lanjutan kegiatan HTI di Sumbawa, HKm Dinas Kehutanan Provinsi NTB, HKm Kelompok Mitra Pengaman Hutan (KMPH) Sesaot, Lombok Barat, yang difasilitasi oleh LP3ES NTB, HKm di kawasan hutan Batukliang, Lombok Tengah yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Kehutanan Provinsi NTB, serta pengembangan HKm di Provinsi NTB bantuan OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) di Lombok Timur dan Lombok Barat (Departemen Kehutanan, 1995).

Program HKm di Nusa Tenggara Barat (NTB), diujicobakan sejak tahun 1995/1996, di areal kawasan hutan lindung Sesaot seluas 25 ha, dengan penggarap sebanyak 58 orang dengan menerapkan pola agroforestry. Pada tahun 1998 kemudian dilakukan evaluasi oleh Departemen Kehutanan. Hasilnya, tingkat keberhasilan mencapai 93 %. Terhadap keberhasilan tersebut, kemudian dilakukan perluasan mencapai 211 Ha, sehingga total luasan areal mencapai 236 ha, dengan jumlah penggarap mencapai 1.224 kepala keluarga. Keberhasilan program ujicoba HKm, kemudian direplikasi di beberapa kabupaten di Provinsi NTB. Sebagai payung hukum, Pemerintah Daerah Provinsi NTB, mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan HKm di NTB. Di dalam PERDA ini diatur dan dijelaskan antara lain mengenai; Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penetapan Wilayah Pengelolaan yang meliputi kriteria dan penetapan wilayah pengelolaan, Penyiapan Masyarakat, Perizinan yang meliputi jenis dan jangka waktu berlakunya izin, Hak Kewajiban dan Larangan, Pengelolaan yang meliputi penataan, perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pemeliharaan hutan, perlindungan hutan, pungutan dan pembagian hasil, Pembinaan dan Pengendalian yang meliputi mekanisme pembinaan dan pengendalian, tugas dan fungsi, pembentukan, Penyidikan, Ketentuan Saksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Permasalahan umum adalah pengelolaan hutan yang belum optimal dan masih tingginya kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Laporan Pertanggungjawaban Gubernur NTB Tahun 2016 menyatakan bahwa tingkat kemiskinan penduduk NTB tahun 2012 mencapai 18,63% dan tahun 2016 menjadi 16,48%, berarti setiap satu tahun di NTB ada penurunan angka kemiskinan rata-rata sebesar 01,08% diperkirakan penduduk miskin tersebut banyak tersebar di sekitar kawasan hutan selain di wilayah pesisir dan perkotaan.

Kawasan hutan di Pulau Lombok tidak terlepas dari keberadaan kawasan Gunung Rinjani (125.000 ha), di mana sebagian besar berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lombok Timur (60.329,67 ha). Dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, 50% di antaranya berada di sekitar dan berinteraksi langsung dengan kawasan hutan, yaitu Kecamatan Sambelia, Sembalun, Suela, Pringgabaya, Wanasaba, Aikmel, Pringgasela, Sikur, Montong Gading dan Jerowaru. Di 10 kecamatan yang didiami oleh 544.673 jiwa (197.516 KK) tersebut terdapat 93.464 KK prasejahtera (Kecamatan Sambelia Dalam Angka 2016, BPS Kab. Lombok Timur). Berdasarkan data tersebut, tingkat kemiskinan masyarakat tergolong masih cukup tinggi (hampir 50%). Kondisi ini sungguh ironis, di mana potensi sumber daya alam yang ada di kawasan hutan tersebut sangat kaya namun masyarakat disekitarnya masih hidup dalam kemiskinan.

## B. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis (1). pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh kelompok HKm Wana Lestari di Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur NTB, serta (2). faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program HKm tersebut.

## C. TEORI

### Implementasi Kebijakan

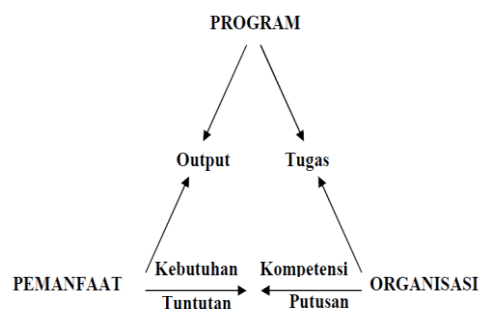
Implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2015: 657) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, melalui dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.

Kebijakan publik diimplementasikan dalam program. Korten (1988) mengajukan suatu model implementasi program yakni menggunakan pendekatan proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program, seperti dalam Gambar 1.

**Gambar 1.**

**Model Kesesuaian Implementasi Program dari David C. Korten**



*Sumber: Korten (1988: 241).*

Korten menggambarkan bahwa model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yaitu (1). Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). (2). Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. (3). Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

### **Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

Hutan kemasyarakatan (HKm), adalah Hutan Negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan) (Cahyaningsih, Nurka, 2006).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Informan merupakan orang-orang yang benar mengetahui permasalahan serta terpercaya dalam hal ini pada lingkup pemerintahan Provinsi NTB seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPT KPH Rinjani Timur. Untuk informan dari unsur masyarakat terdiri dari Ketua Kelompok HKm Wana Lestari, dan para anggota Kelompok HKm tersebut.

Penetapan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan penelusuran pustaka mengenai PERDA Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Lokasi ini sengaja diambil dengan beberapa pertimbangan karena Desa Dara Kunci merupakan salah satu dari

tiga lokasi areal HKm di Pulau Lombok Provinsi NTB, akan tetapi wilayah desa tersebut kerap dilanda bencana banjir bandang saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau, Oleh karena itu perlu diketahui sejauhmana penyelenggaraan HKm untuk mewujudkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat kawasan hutan selaku pengelola Hutan Kemasyarakatan. Diharapkan data serta temuan yang didapat berguna dalam pemecahan permasalahan yang terjadi dalam Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) sehingga dapat diimplementasikan dengan lebih baik.

Jenis data yang digunakan adalah data yang berbentuk teks dan data yang berbentuk kata-kata, seperti yang terdapat dalam Lofland dan Lofland (1984: 47) dalam buku Moleong (2016: 157), bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari objek yang diteliti, berupa laporan-laporan, dokumen-dokumen atau data-data dan informasi dari sumber-sumber lain yang sudah diolah seperti hasil penelitian dan publikasi lainnya seperti koran, newsletter, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

Teknik analisis data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Saldana (2014: 31-33) yang terdiri dari *Condensation Data*, *Display Data*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*. Data yang sudah dikumpulkan, dianalisis dan diinterpretasikan melalui reduksi data yang telah dipilah, disajikan, kemudian ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono 2015: 273). Triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan cek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara melakukan cek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Dara Kunci merupakan salah satu desa definitif dari 11 desa yang berada di wilayah Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur dengan luas wilayah 35.16.10 Km<sup>2</sup>, dengan luas 3.52 km<sup>2</sup> dari seluruh wilayah Kecamatan Sambelia, dengan topografi berada pada dataran sedang. Dengan topografi ini Desa Dara Kunci ada pada ketinggian 40 mdpl. Desa Dara Kunci yang merupakan desa di dekat pantai dan hutan dipengaruhi oleh 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan curah hujan sebanyak 1.131,6 mm/tahun dengan suhu rata-rata 34°C. (Monografi Desa Dara Kunci, 2013).

Pada dasarnya kondisi kawasan hutan produksi di KPH Rinjani Timur berada pada kondisi yang kurang baik (agak kritis). Tegakan yang ada merupakan hasil kegiatan reboisasi yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya baik berupa hasil dari Program Gerhan (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan), Hutan Cadangan Pangan, HKm, PHTUL (Pembangunan Hutan

Tanaman Unggulan Lokal), JIFPRO (Japan International Forestry Promotion and Cooperation) serta beberapa kegiatan reboisasi lainnya dalam skala kecil seperti pembangunan demplot tanaman.

### **Pelaksanaan Penyelenggaraan Program HKm Oleh Kelompok HKm Wana Lestari di Desa Dara Kunci**

Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diperkuat dengan regulasi yaitu Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi NTB sangat bermanfaat bagi ekologi. Hal ini bisa tercapai apabila masyarakat selaku penerima manfaat HKm bisa melaksanakan kelola kawasan sebagai tempat ekologi dan melaksanakan fungsi hutan baik fungsi tata air/hidrologi, konservasi dan perubahan iklim. Apabila semua ini berjalan maka manfaat ekologi bisa tercapai. Namun ternyata kondisi/proporsi tanaman yang ada di lahan HKm tersebut banyak yang tidak sesuai. Jika mengacu pada aturan porsi tanaman maka tanaman keras sebanyak 60% dan 40 % lainnya adalah tanaman pangan. Akan tetapi, pada prakteknya yang terjadi malah sebaliknya.

Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan khususnya di Desa Dara Kunci sangat berdampak bagi peningkatan ekonomi anggota kelompok. Hal ini didapatkan dari hasil tanaman MPTS (Multi Purposes Tree Species) seperti asam, jambu mente, srikaya dan tanaman palawija/tumpang sari. Dari kondisi awal di mana pendapatan anggota kelompok penerima manfaat hanya untuk hidup sehari-hari, namun saat ini mereka sudah mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke tingkat pendidikan perguruan tinggi.

Dari hasil wawancara terkait dengan manfaat sosial-budaya dari program HKm, para informan sepakat menyatakan bahwa HKm sangat besar pengaruhnya dalam penguatan sosial-budaya masyarakat terutama kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk terciptanya kearifan lokal. Seperti sesama anggota sering bergotong-royong baik di dalam kawasan dan yang sering adalah di lingkungan masyarakat dalam berbagai acara contohnya acara pernikahan, zikir, maupun kematian.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan masyarakat Desa Dara Kunci sesuai dengan program hutan kemasyarakatan untuk melaksanakan pelatihan. Penyiapan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan HKm dilakukan untuk menyiapkan kemampuan, kemauan dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam mengelola HKm, sebelum diterbitkan izin. Upaya yang dilakukan dalam mentransmisikan kebijakan/aturan HKm sebelum kelompok terbentuk sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan LSM pendamping. Berbagai jenis pelatihan dilakukan dalam penyiapan kemampuan anggota kelompok HKm Wana Lestari, misalnya pelatihan pengelolaan HKm, pelatihan pembibitan, pelatihan administrasi kelompok dan pelatihan pengolahan pasca panen. Kendalanya adalah para peserta yang mengikuti pelatihan ini kurang mampu mentransmisikan isi pelatihan kepada anggota-anggota yang lain, sehingga pemahaman mereka tidak sama satu dengan lainnya. Selain itu pelatihan ini juga tidak rutin dilakukan, hanya pada saat awal program HKm sehingga sangat sulit untuk merubah



perilaku atau menambah kemampuan kelompok tersebut dalam mewujudkan “Hutan Lestari Rakyat Sejahtera”.

### **Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

a. Kesesuaian antara Hasil Program dengan Kebutuhan Pemanfaat

Banyak ditemukan fakta bahwa motivasi dari masyarakat penerima manfaat dalam hal mengelola kawasan HKm rendah. Mereka hanya ingin mendapatkan lahan untuk peningkatan taraf hidup, dan belum ada evaluasi program dari pihak pemerintah. Terkait dengan pengkayaan tanaman untuk areal HKm, bibit yang diberikan didatangkan tidak tepat waktu yaitu saat menjelang musim kemarau, sehingga ketika ditanam hanya sedikit yang berhasil hidup.

b. Kesesuaian Pelaksanaan Program dengan Kemampuan Organisasi Pelaksana

Sumber daya manusia, dalam hal ini unit pelaksana teknis untuk menjalankan program ini, tidak didukung oleh sumber daya finansial yang memadai sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap motivasi organisasi pelaksana. Luasnya areal kawasan HKm dan banyaknya kelompok HKm (17 Kelompok Tani dengan jumlah anggota 437 orang) mengakibatkan pendampingan dari organisasi pelaksana kurang maksimal dilakukan.

c. Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana

Program pemberdayaan terhadap masyarakat yang tidak tepat sasaran mengakibatkan pemborosan dana, waktu dan tenaga. Selain itu pengembangan potensi masyarakat menjadi tidak optimal dan masyarakat semakin tidak berdaya dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mampu mengidentifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan dengan lebih jelas dan cermat, sehingga proses-proses pengakuan hak, izin maupun kolaborasi menjadi tidak maksimal.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penyelenggaraan Program HKm oleh Kelompok HKm Wana Lestari di Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB:

- a. Adanya perbedaan pemahaman masyarakat tentang Program HKm untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, yang diwujudkan melalui pola tanam dengan memilih jenis-jenis tanaman yang dapat berproduksi dalam jangka pendek dan kontinyu (jenis tanaman musiman) dan tanaman yang berproduksi secara kontinyu dan bernilai ekonomi tinggi (jenis tanaman tahunan). Dari jenis tanaman yang direkomendasikan jika dianggap tidak menguntungkan, masyarakat tidak melakukan penanaman, namun jika dianggap memberikan manfaat, masyarakat cenderung akan menanam tanaman yang direkomendasikan meskipun tidak sesuai dengan komposisi yang disepakati.
- b. Untuk rehabilitasi dan pemeliharaan hutan, hal ini sudah dijalankan setiap tahunnya oleh kelompok penerima manfaat, namun hasilnya belum maksimal mengingat perencanaan dari

instansi pemerintah atau pihak yang mendistribusikan bibit seringkali tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan kondisi musim yang sedang berjalan.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Program HKm di Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB:
  - a. Dari sisi penerima manfaat program HKm diketahui bahwa tingkat pertumbuhan dan jumlah penduduk yang semakin padat dan diikuti dengan semakin sempitnya lahan pertanian, menyebabkan sumber daya hutan menjadi alternatif penunjang ekonomi rumah tangga untuk kebutuhan jangka pendek. Kontribusi sumber daya hutan terhadap aspek ekonomi masyarakat di sekitar hutan sangat tinggi mengakibatkan eksploitasi cukup berlebihan jika tidak dibina dan didampingi secara intensif oleh pelaksana program dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan UPT KPH Rinjani Timur.
  - b. Dari pihak implementor dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB di tingkat provinsi dan UPT KPH Rinjani Timur di tingkat kabupaten, untuk menjalankan program ini telah menyiapkan sumber daya manusia akan tetapi tidak didukung oleh sumber daya finansial yang memadai sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap motivasi organisasi pelaksana. Selain itu, fasilitasi Program HKm dilakukan oleh LSM dengan bantuan lembaga pendonor. Kebijakan dari pemerintah yang sering berubah-ubah dan tumpang tindih juga mempengaruhi keberhasilan Program HKm. Kurangnya peran dan sinergitas diantara para pihak (*stakeholder*), baik di tingkat pusat dan daerah mengakibatkan terjadinya kesenjangan kegiatan, sehingga program menjadi tidak efektif dan efisien.

## B. Saran

1. Perlunya peningkatan kualitas kerjasama kemitraan dengan berbagai *stakeholder* terkait baik instansi pemerintah maupun swasta sehingga bisa bermanfaat secara maksimal kepada seluruh anggota Kelompok HKm Wana Lestari Desa Dara Kunci.
2. Perlu adanya peningkatan pelatihan pengolahan hasil dari sumber daya hutan bagi anggota kelompok HKm Wana Lestari Desa Dara Kunci.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar., Tarigan, Antonius., 2000, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya.
- Cahyaningsih, Nurka, 2006, Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat: Panduan Cara Memproses Ijin dan Kiat Sukses Menghadapi Evaluasi, World Agroforestry Centre Southeast Asia Regional Program, Bogor.
- Departemen Kehutanan, 1995, Manual Kehutanan. Kopkarhutan. Jakarta.
- Dipokusumo, Bambang, Hariadi Kartodihardjo, Dudung Darusman, dan Arya Hadi Dharmawan, 2011, Kajian Dinamika Kebijakan Hutan Kemasyarakatan dan Alternatif Penyelesaian Konflik

- Kepentingan Pada Kawasan Hutan Lindung Di Pulau Lombok, Jurnal Agroteksos Vol. 21 No.2-3, Desember 2011. Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Mataram NTB.
- Kecamatan Sambelia Dalam Angka 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB.
- Korten, David. C & Sjahrir, 1988, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur NTB Tahun 2016.
- Media DAS, 2007, Perubahan Paradigma Pembangunan Kehutanan: Kerjasama Pusat dan Daerah Sangat Diperlukan. Edisi 07/Tahun I/Desember 2007. Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2016, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Bandung.
- Monografi Desa Dara Kunci, 2013.
- Nugroho, Riant, 2014, Public Policy, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Prasetyo, Agus Budhi, 2013, Hutan Kemasyarakatan (HKm), e-magazine Warta BP2SDM, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Retnowathi, Renny, 2015, HKm Menjadi Solusi Permasalahan Kehutanan, Diakses dari: [hutankitarennny.blogspot.co.id/2015/01/hkm-menjadi-solusi-permasalahan.html](http://hutankitarennny.blogspot.co.id/2015/01/hkm-menjadi-solusi-permasalahan.html).
- Saldana, 2014, Qualitative Data Analysis: A Methods Sources Book, 3rd Edition. United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.